

**KONTESTASI ANTARA
KHOLILURRAHMAN VERSUS AHCMAD SYAFI'I
DALAM PRAKTEK DEMOKRATISASI LOKAL
(Fenomena Pemilihan Kepala Daerah sebagai Momentum Sirkulasi
Elit dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013 Pamekasan)**

Abd. Walid

Organisasi IPPNU Madura

Abstrak: *Penelitian ini menemukan berapa hal “paktek sirkulasi elit untuk mendapatkan kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 di antaranya adalah alasan pragmatis yaitu untuk memperjuangkan bagaimana sejarah saat elit tersebut pemerintah dan bagaimana ia menjalankan jabatannya. Alasan lain adalah karena faktor ideologis adalah bahwa mereka ingin memperjuangkan prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. membawa berbagai dampak, namun dalam kajian ini hanya memfokuskan pada dampak positif dan negatif. Di lihat dari aspek positif, Pemilihan kepala Daerah pada tahun 2013 dinilai berhasil mendorong sirkulasi elit politik. Proses demokrasi di negeri ini dinilai telah mengikuti kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas politik yang benar, meskipun harus melalui jalan politik yang amat terjal. Keterbukaan media (televisi, radio, koran, majalah dan media sosial) juga berhasil melakukan pendidikan politik. Di lihat dari aspek negatif, Masyarakat kita tidak bisa lagi dibujuk-rayu dengan iming-iming materi atau uang. Mereka kini sudah bisa membedakan siapa elit politik yang tabu, mau dan mampu berjuang untuk kepentingan masyarakat, dan siapa elit politik yang hanya bisa bicara atau sekadar tebar pesona. Mereka juga sudah bisa membedakan siapa figur yang memiliki gagasan jernih, baru, dan siapa figur yang sesungguhnya telah lelah, tua dan hanya pandai bernostalgia.*

Kata kunci: Sirkulasi, Elit, Kekuasaan

A. Pendahuluan

Sebagai produk dari reformasi, peralihan kekuasaan dilakukan melalui sebuah kompetisi terbuka dan telah diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini membuat banyaknya elit yang bertarung untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah. Jabatan kepala daerah adalah merupakan sebuah jabatan publik yang menggiurkan, karena Jabatan kepala daerah dapat diartikan sebagai kekuasaan dan kekuasaan tersebut merupakan suatu hal yang langka, maka dari itu tak mengherankan jika banyak elit lokal pun bersaing memburu kekuasaan yang sifatnya langka ini untuk bisa menjadi dominan diantara elit politik yang ada, walaupun harga kekuasaan itu sangatlah mahal dan beresiko.¹

Demokratisasi merupakan sebuah urunan dari sistem politik yang dinamakan demokrasi. Sedangkan *Demokrasi* secara etimologis mengandung makna dan pengertian yang universal. Salah satunya adalah *“government of the people, by the people, and for the people”*. Menurut bahasa, *Demokrasi* berasal dari bahasa Yunani yaitu dari *Demos* (Rakyat) dan *Cratos* atau *Cratein* (pemerintahan atau kekuasaan). *Demokrasi* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem *Demokrasi* rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan.

Dari kitab tersebut pada intinya secara harfiah *Demokrasi* adalah pemerintahan rakyat (kekuasaan rakyat) secara umum dapat diartikan sebagai semua paham (Ideologi Politik) yang berdiri diatas kekuasaan rakyat bagi diri mereka dengan memilih (menentukan pemimpin secara bebas untuk memimpin mereka) khususnya pemimpin yang menentukan

¹Dalam konteks pemilihan umum ini yang akan menduduki jabatan kepala daerah adalah elit yang mendapat legitimasi dari rakyat yang disini adalah jumlah suara terbanyak yang diterima oleh elit yang bersaing untuk jabatan tersebut. Untuk itu para elit berusaha untuk menburu dukungan massa yang banyak, yang kebanyakan elit melakukannya dengan cara memobilisasi para pendukungnya dan merebut pendukung elit lain melalui TV, radio, internet, Koran, baliho, poster dan kampanye sejumlah media promosi lainnya yang digunakan secara aktif selama periode pemilihan umum atau dapat dikatakan melakukan praktek marketing politik demi mendapatkan dukungan dari rakyat. Selain itu belum tentu elit tersebut mendapatkan jabatan yang diinginkan sedangkan biaya yang dikeluarkan sudah terlalu besar. Oleh karena itu penulis melihat mengapa untuk mendapatkan kekuasaan sangatlah mahal dan beresiko.

hukum untuk mereka, kemudian mereka mengawasi para pemimpin tersebut setelah memilih. Oleh karena berkumpulnya semua rakyat dalam menentukan kebijakan tidak memungkinkan, maka solusi dari hal tersebut adalah mengirim wakil mereka yang dipilih oleh Rakyat untuk duduk diparlemen dalam menentukan kebijakan.

Pamekasan merupakan salah satu kabupaten Jawa Timur yang terletak di Pulau Madura dengan jarak sekitar kurang lebih 125 KM dengan Surabaya yang dipisahkan oleh laut.² Di Madura sendiri terdapat 4 Kabupaten. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pamekasan merupakan wilayah yang terletak ditengah-tengah kawasan Madura. Daerah utara berbatasan dengan Laut Jawa, selatan Selat Madura, Barat Kabupaten Sampang, sedangkan timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 835.101 yang mayoritas adalah petani.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang telah melaksanakan even Pilkada pada tahun 2013 yang lalu. Kemenangan Achmad Syafi'i tertarik untuk dikaji: *Pertama*, melihat latar belakang calon yang notabene tidak punya latar belakang kyai berhadapan dengan incumbent KH. Kholilurrahman yang berlatar belakang kyai, sementara Pamekasan merupakan kabupaten dengan masyarakat yang agamis. *Kedua*, melihat dukungan partai yang didapat KH. Kholilurrahman yang didukung oleh koalisi banyak partai dan partai-patai besar di kabupaten Pamekasan, berhadapan dengan Achmad Syafi'i yang didukung hanya beberapa partai. *Ketiga* kontestasi antara Achmad Syafi'i dan KH. Kholilurrahman merupakan duel klasik yang terjadi sejak pilkada 2008 dan berlanjut pada pilkada 2013 serta saling mengalahkan. Dari tiga alasan diatas, menarik untuk mengetahui pertarungan dua kandidat tersebut dalam even pilkada, sehingga Achmad Syafi'i mampu tampil sebagai pemenang dalam pilkada di kabupaten Pamekasan 2013.³

Sebagaimana di ketahui kabupaten Pamekasan terdapat beberapa lembaga Pendidikan Islam, terutama Pesantren, yang pimpinan Pesantren tersebut disebut dengan kyai (Mak Kaeh dalam bahasa Madura) sehingga Pesantren dan Pamekasan tidak bisa lepas yang akhirnya Pamekasan

²<http://www.pamekasan.go.id/index.php/about-yjsg/default-grid-layouts> diakses pada tanggal 15 oktober 2013 jam 16.25.

³Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 55.

mendapat julukan Gerbang Salam. Kyai merupakan salah satu elit dalam masyarakat, begitu juga di Pamekasan. Kyai merupakan suatu figur elit lokal yang disegani karena Ilmu dan Kharismanya yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat di Pamekasan khususnya dan Madura pada Umumnya.⁴ Masyarakat Pamekasan percaya dan meyakini bahwa Kyai adalah seseorang yang mampu memberikan sesuatu baik kesuksesan maupun keselamatan. Hal itu terjadi dikarenakan mereka berkeyakinan bahwa Kyai adalah orang yang suci karena beliau adalah pewaris para Nabi, yang berhak dan punya kuasa dalam memutuskan suatu perkara baik keagamaan maupun lainnya, seperti persoalan Ekonomi, Sosial dan Politik. Dan Kyai merupakan figur elit lokal yang memiliki pengetahuan keagamaan sebagai teladan bagi masyarakat sekitarnya dalam berbagai pola kehidupan sosial masyarakat.⁵

Seiring berjalannya waktu, peran, fungsi dan kedudukan Kyai mengalami perluasan terutama pasca Reformasi. Kyai tidak hanya sebagai panutan dalam keagamaan dan pengayom dalam masyarakat namun Kyai juga berperan dalam memutuskan suatu perkara yang bisa membawanya pada penurunan dan bahkan dapat menghancurkan wibawanya. Kyai mulai terjun dalam bidang Politik praktis, dan mulai terjun dalam kekuasaan. Di era Orde Baru, Kyai terpinggirkan posisinya dan tidak determinan dalam proses pengambilan keputusan publik. Pasca Orde Baru, Kyai tidak lagi sekedar penarik suara (*vote-getter*) tetapi sekaligus menjadi pemimpin politik (*elective-political leader*) atau pemain politik (*political player*) yang memiliki posisi tawar (*bargaining-position*) kuat dan menentukan dalam proses politik. Pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, beberapa Kyai terpilih menjadi pemimpin politik (*elective-executive political leader*) atau pemain politik (*political player*) yang memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses politik. Hal itu antara lain tercermin pada posisi Kyai sebagai presiden ataupun wakil bupati.⁶

Kontestasi politik dalam ajang pilkada Pamekasan 2013 diikuti oleh tiga pasangan kandidat dengan latar belakang yang berbeda. Antara lain adalah Calon nomor orut 1, Anwari-Kholil (AHOK) yang di usung

⁴Khoirudin, *Politik Kyai Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis*, (Malang: Averroes Press, 2005), hlm. 1.

⁵*Ibid.*

⁶Sidik, Jatmika Desertasi "Kyai dan politik lokal" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah

PKNU partai republikan dan 14 parpol non parlement meraup 6.905 suara (1,53%). Nomor urut 2, Kholilurrahman-Masduki (KOMPAK) di usung PKB, PBB, Partai Golkar, PBR dan PDIP serta sebagai basis dukungannya hanya meraih 205.902 suara (44,71%) , dan nomor urut 3, Achmad Syafi'i-Kholil Asyari (ASRI) yang diusung partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kesejahteraan dan partai Hanura, meraih suara sebanyak 250.336 (54,51%) dari 461.077 pemilih yang memberikan hak suaranya pada 9 januari 2013.

Menarik untuk dikaji tentang kemenangan Achmad Syafi'i dalam mengalahkan KH. Kholilurrahman (*incumbent*) dalam pemilihan kepala daerah Pamekasan 2013 9 Januari 2013. Kemenangan Achmad Syafi'i disini melihat bahwa adanya hubungan yang kompetitif dengan KH. Kholilurrahman yang sudah bersaing sejak pilkada 2008 dan saling mengalahkan nantinya akan berujung terjadinya sirkulasi elit.

B. Fenomena Pemilihan Kepala Daerah sebagai Momentum Sirkulasi Elit dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013 Pamekasan

Salah satu ciri Negara demokratis yaitu *rule of law* (peraturan hukum) adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat

secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

Mosca dalam teori elit politiknya mengemukakan diatas bahwa karakteristik yang membedakan elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Oleh sebab itu elit atau yang disebut dengan kelas yang memerintah itu kehilangan kecakapan dalam memimpin dan menjalankan kontrol politiknya. Maka orang-orang yang diperintah atau disebut dengan orang-orang diluar kelas lebih menunjukkan kecakapan yang lebih baik, dan kemungkinan kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Dengan demikian jika dalam elit yang berkuasa tidak mampu memberikan layanan-layanan yang diperlukan oleh massa, atau layanan yang diberikan dianggap tidak bernilai lagi, dan terdapatnya perubahan pada kekuatan sosial masyarakat, maka perubahan tidak dapat dihindari. Dalam hal ini juga bahwa rumusan kepentingan dan cita-cita baru menimbulkan persoalan baru yang nantinya akan mempercepat terjadinya pergantian elit.

Berangkat dari pemaparan diatas bahwa Proses dalam sirkulasi ini tidak hanya merupakan proses pertukaran posisi antar elit saja, melainkan juga mencakup pertukaran posisi antara elit yang sedang memerintah (*Governing Elit*) dengan elit yang sedang tidak memerintah (*non Governing Elit*). Dengan demikian Proses sirkulasi mengandung arti bahwa pergantian elit ditujukan untuk memperoleh kualitas elit yang lebih baik. Oleh sebab itu sirkulasi ini merupakan perputaran elit dari kelompok kelas di masyarakat ke kelompok kelas lainnya.⁷

Sehingga sirkulasi elit ini terjadi karena kelas-kelas penguasa mengalami fase penurunan dalam pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat, ataupun pelayanan tersebut dianggap sudah tidak bernilai lagi. Singkatnya, perubahan dalam pola dukungan kepada orangnisasi politik memberi adil bagi menurutnya pengaruh dalam bidang politik. Selain itu, hal itu juga menyebabkan adanya variasi dalam “pola memilih” di kalangan umat Islam Masyarakat kita tidak bisa lagi dibujuk-rayu dengan iming-iming materi atau uang. Mereka kini sudah bisa membedakan siapa elit politik yang tahu, mau dan mampu berjuang untuk kepentingan masyarakat, dan siapa elit politik yang hanya bisa bicara atau sekadar tebar pesona. Mereka juga sudah bisa membedakan siapa figur yang memiliki

⁷Endang Turmudi, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 256.

gagasan jernih, baru, dan siapa figur yang sesungguhnya telah lelah, tua dan hanya pandai bernostalgia. Manakala pandangan tersebut benar, Pemilihan kepala Daerah pada tahun 2013 dinilai berhasil mendorong sirkulasi elit politik. Proses demokrasi di negeri ini dinilai telah mengikuti kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas politik yang benar, meskipun harus melalui jalan politik yang amat terjal. Keterbukaan media (televisi, radio, koran, majalah dan media sosial) juga berhasil melakukan pendidikan politik.⁸

C. Sirkulasi Elit untuk Mendapatkan Kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Pamekasan 2013

Sirkulasi elit senyatanya tidak hanya merupakan proses pergantian atau pertukaran antara elit dan non elit atau massa, tapi juga mencakup proses pergantian atau pertukaran posisi di antara sesama elit sendiri. Hal yang dinyatakan belakangan dapat dijelaskan bahwa lapisan elit, sebagaimana dilukiskan Parato, terdiri dari mereka yang tergabung dalam kelompok yang menduduki jabatan politis dan mereka yang tidak menduduki jabatan politis yang biasanya menjalankan peran sebagai kelompok oposisi. Pergantian atau pertukaran posisi di antara dua kelompok tersebut sangat dimungkinkan, dan proses itu dapat disebut pula sebagai sirkulasi elit.

Sehubungan dengan sirkulasi elit, baik proses tersebut berlangsung antara elit dan massa ataupun di antara sesama elit, sebenarnya mengandung esensi bahwa proses tersebut merupakan upaya menggantikan elit dengan kelompok baru yang mempunyai kualitas lebih baik. Proses sirkulasi elit seperti ini memang merupakan hal yang ideal, di mana elit yang lama akan diganti kelompok baru dengan kualitas yang lebih baik yang diharapkan lebih mampu merespon kepentingan masyarakat yang lebih beragam dan selalu berubah. Akan tetapi proses sirkulasi elit dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan munculnya kelompok baru yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk berperan sebagai elit.

Pada umumnya di masyarakat di mana sirkulasi elit berlangsung dengan baik dan teratur, individu-individu yang termasuk dalam *'counter elite'* tidak secara terbuka atau terang-terangan menyatakan bahwa dirinya

⁸Wawancara Dengan Bapak Achmad Syafi'i hari Selasa Jam: 10-13 tanggal 4 Februari 2014

mempunyai ambisi untuk memasuki jaringan elit. Ambisi mereka biasanya diselubungi berbagai ragam slogan seperti halnya persamaan hak, demokrasi, kebebasan bagi semua warga, dan slogan lain yang senada dan slogan-slogan tersebut biasanya pula selalu menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan massa. Dalam perkembangannya, pasangan Achmad Syafi'i-Kholil Asyari (ASRI) tak hanya menjadi basis kekuatan moral. Dulu, muncul fenomena ASRI struktur. ASRI yang mengembangkan potensi dirinya dalam struktur kekuasaan negara. Sebagai ASRI menduduki posisi jabatan publik di pemerintahan. Sebagian lainnya, menambah dunia usaha guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomisnya.

Pergeseran-pergeseran posisi itu, dapat diamati dari majunya sejumlah pendukung para kyai dalam peraturan dunia politik praktis, baik di kalangan eksekutif dengan menjadi kepala daerah di Kabupaten Pamekasan Madura. Pasangan ASRI mempunyai figur yang besar terhadap masyarakat Pamekasan, kemenangan Pasangan Achmad Syafi'i-Kholil Asyari (ASRI) sangat besar sekali dengan kemenangan pemilihan kepala Daerah di Kabupten Pamekasan tersebut.⁹

Harus diakui pula, terdapat plus dan minus di balik dikotomi peran antara pasangan Nomer 1) Anwari dan Kholil (AHOK) di dukung oleh babarapa Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kedaulatan, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (PRN), Partai Pelopor, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Persatuan Nabdatul. Pasangan Nomer urut 2) Ummah Indonesia (PPNUI), dan Kholilurroman dan Masdudi (KOMPAK) di dukung babarapa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) struktural. Dan pasangan Nomer urut 3) Achmad Syafi'i dan Kholil Asyari (ASRI) didukung dari babarapa Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan

⁹Wawancara Dengan Bapak Achmad Syafi'i hari Selasa Jam: 10-13 tanggal 4 Februari 2014.

Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat. Masing-masing memiliki kelebihan dan sisi lemah. Ini karena kultur politik tidak selalu paralel dengan struktur politik. Ketidaksesuaian antara budaya politik dengan struktur politik itu dipengaruhi oleh pola hubungan yang menentukan tingkat stabilitas politik dan perubahan-perubahan sistem politik

Sering kita dengar kalau politik adalah seni seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan. Ketika kekuasaan diidentikkan dengan uang, maka politik pun dibangun atas kepentingan-kepentingan orang atau sekelompok orang untuk memperoleh uang. Politik uang seperti itu, terkait erat pula dengan kondisi dan kekinian zaman di mana uang menjadi simbol dari berbagai alat transaksi. Uang sebagai alat tukar, pada akhirnya dipertukarkan dengan apa saja, material maupun immaterial, termasuk untuk memperoleh kekuasaan dalam struktur politik. Pemilihan kepala daerah dapat dipahami sebagai suatu momentum terjadinya sirkulasi elit, dan yang menentukan adalah massa dengan melihat.

bagaimana elit tersebut secara individu dan melihat keadaan sosial serta bagaimana sejarah saat elit tersebut memerintah dan bagaimana ia menjalankan jabatannya. Sirkulasi elit ini juga didorong oleh adanya kepentingan-kepentingan politik yang terwujud dalam visi dan misi maupun kepentingan individu. Selain dorongan dari rakyat yang *need and hope* nya dapat di tanggapinya secara serius oleh elit yang dipercaya sebagai elit yang sedang memerintah. Untuk mencapai posisi tersebut maka perlu melewati tahap persaingan untuk mendapatkan dukungan dari massa dengan membawa wacana-wacana yang terkait dengan apa yang akan dibutuhkan oleh massa, sehingga akan memunculkan legitimasi dari masyarakat. Dan dapat diketahui bahwa esensial dari sirkulasi elit adalah menemukan elit yang lebih berkualitas dari pada elit sebelumnya, yang dianggap mampu dengan baik merumuskan masalah pokok dari apa yang dihadapi masyarakat dan mampu menemukan jawaban yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

Momentum sirkulasi elit yang terbuka ini, secara langsung menimbulkan persaingan, dimana dalam konteks demokrasi masyarakatlah yang memegang peranan untuk menentukan siapa menggantikan siapa atau menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Maka dari itu, elit-elit tersebut menjaring pendukung dan memobilisasi mereka. Karena itu tidak

mengherankan bahwa masyarakat menilai siapa elit yang akan didukung dengan melihat kapabilitas individu, bagaimana elit tersebut memperlakukan kekuasaan yang ada ditangannya.

Kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan rakyat dan lain-lain, tetapi, kekuasaannya itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukkan iklan dan keluarganya dalam pemerintahan, menggalang kekuatan untuk memberangus oposisi dan lain-lain. Di samping itu juga terdapat elit yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elit, lapisan elit ini akan menjadi pengganti elit di atasnya jika sewaktu-waktu elit pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, elit ini juga menjadi elit tandingan apabila elit yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas mengendalikan kekuasaan.

Terkait dengan kemenangan Bapak Achmad Syafi'i itu yang dinilai semua masyarakat pamekasan itu bukan dari partainya, akan tetapi figur seorang Achmad Syafi'i, dimana seorang Achmad Syafi'i itu sesosok orang yang dikenal kejujurannya oleh masyarakat, kejujuran dan kepolosan Achmad Syafi'i menjadikan terkenal kebaikannya dan dipilih banyak masyarakat. Menjadi seorang publik figur, terlebih lagi seorang politisi tentu harus siap menghadapi semacam tantangan yang ada, akan tetapi beliau tersebut menghadapi dengan kesabaran dan kerja keras atas apa yang diinginkannya. Beliau dikenal dengan pekerja keras dan tidak kenal lelah, semangat beliau dalam bekerja melebihi kebiasaan banyak orang

Setelah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan mengadakan rapat pleno untuk membahas pelaksanaan rekapitulasi penghitungan ditingkat Kabupaten. Dari hasil rapat diputuskan untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2013 bertempat di gedung PKPN Pamekasan Jalan Kemuning No.1 Pamekasan. Untuk undangan yang diundang adalah:

1. Saksi pasangan calon
2. Forpimda Kabupaten Pamekasan
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

4. Panwaslukada Kabupaten Pamekasan
5. Panwascam
6. Anggota PPK se Kabupaten Pamekasan
7. Instansi terkait
8. Media

Hasil dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pasangan Calon Al Anwari dan Holil, S.Hi memperoleh 6.905 suara dengan prosentase 1,49 %
- b) Pasangan Calon KH. Kholilurrahman, M.Si, dan Ir. Muhammad Masduki memperoleh 205.902 suara dengan prosentase 44,46%.
- c) Pasangan Calon Drs.H. Achmad Syafi'i, M.Si dan Drs. Halil memperoleh 250.336 suara dengan prosentase 54,05 %.

Dari hasil tersebut Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan kemudian menuangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB-KWK KPU beserta lampirannya), yang sebelumnya telah disampaikan kepada para saksi yang hadir untuk menyatakan keberatan atas hasil tersebut. Saksi yang hadir dari ketiga pasangan calon adalah :

- 1) Mohammad Erfan saksi dari pasangan calon Al Anwari dan Holil, S.Hi.
- 2) H. Abd. Gafur saksi dari pasangan calon KH. Kholilurrahman, M.Si, dan Ir. Muhammad Masduki.
- 3) Heru Budhi Prayitno saksi dari pasangan calon. Drs.H. Achmad Syafi'i, M.Si dan Drs. Halil

Adapun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 di tingkat Kabupaten (Formulir Model DB-KWK beserta lampirannya) sebagaimana dalam lampiran. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah surat suara sah adalah sebesar 440.723 dan yang surat suara tidak sah sebesar 8.593. Adapun jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih untuk laki-laki sebesar 303.994, untuk perempuan sebesar 326.262, dengan jumlah 630.256. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk laki-laki sebesar 212.999, perempuan sejumlah 248.078, dengan jumlah total 461.077. Jumlah pemilih dalam salinan DPT

yang tidak menggunakan hak pilih untuk laki-laki sebesar 91.702, untuk perempuan sebesar 78.353, dengan total sejumlah 170.055. Jumlah pemilih dari TPS lain sebesar 1.206. Untuk jumlah surat suara (termasuk cadangan) sebesar 618.492, surat suara terpakai sejumlah 445.446, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebesar 332, surat suara yang tidak terpakai sejumlah 172.714. Surat suara sah seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati sebesar 440.723, jumlah surat suara tidak sah sebesar 8.229, jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 448.952, dengan jumlah TPS 1.582, dan jumlah PPS 189. Dan Saksi yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu saksi dari AHOK dan KOMPAK.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dan Sekretaris pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 di Gedung KPKN Pamekasan dengan hasil menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Januari 2013 Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah diberikan kesempatan kepada pihak-pihak pasangan calon yang keberatan dan tidak dapat menerima hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk mengajukan upaya hukum guna menyampaikan keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. Dalam waktu 3 (tiga) hari tersebut, pasangan calon KH. Kholilurrahman, M.Si, dan Ir. Muhammad Masduki mengajukan keberatannya yang diperkuat dengan Surat Mahkamah Konstitusi nomor 39/PAN.MK/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, pelanggaran yang mengakibatkan tidak terlaksananya pemilu yang demokratis.

D. Penutup

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap tulisan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pemilihan kepala daerah dapat dipahami sebagai suatu momentum terjadinya sirkulasi elit, dan yang menentukan adalah massa dengan melihat bagaimana elit tersebut secara individu dan melihat keadaan sosial serta bagaimana sejarah saat elit tersebut memerintah dan bagaimana ia menjalankan jabatannya. Sirkulasi elit ini juga didorong oleh adanya kepentingan-kepentingan politik yang terwujud dalam visi dan misi maupun kepentingan individu. Selain dorongan dari rakyat yang kemaungan dan harapannya dapat di tanggapi secara serius oleh elit yang dipercaya sebagai elit yang sedang memerintah. Untuk mencapai posisi tersebut maka perlu melewati tahap persaingan untuk mendapatkan dukungan dari masa dengan membawa wacana-wacana yang terkait dengan apa yang akan dibutuhkan oleh massa, sehingga akan memunculkan legitimasi dari masyarakat. Dan dapat diketahui bahwa esensial dari sirkulasi elit adalah menemukan elit yang lebih berkualitas dari pada elit sebelumnya, yang dianggap mampu dengan baik merumuskan masalah pokok dari apa yang dihadapi masyarakat dan mampu menemukan jawaban yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Turmudi, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Haryanto, *Kekuasaan Elit suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah, 2005.
- Janedjri M Jaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konpres, 2012.
- Jonge, huub be, *Madura Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Khoirudin, *Politik Kyai Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis*, Malang: Averroes Press, 2005.

- Khoirudin, *Politik Kyai Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik Praktis*, Malang: Averroes Press, 2005.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Pareto dan Mosca dalam Haryanto, *Ke-kuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: Gedung PAU UGM, 2005.
- Pondok Pesantren Panempun Pademawu Pamekasan, *Dokumentasi*, Pamekasan 10 Januari 2012.
- Rohman, Abdul dan Barid Ishom, *Meluruskan Peran Birokrasi dalam Pilkada*, Jatim: Publik Policy institute Kompyawisda, 2005.
- Scott, C. James, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1976.
- Sidik Jatmika Desertasi "*Kyai dan politik lokal*" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah.
- Sidik, Jatmika Desertasi "*Kyai dan politik lokal*" Studi Kasus Reposisi Politik Kyai NU Kebumen, Jawa Tengah
- Syafi'i, Achmad, *Sang Petualang Desa*, Pamekasan, Litera Jannata Perksa, 2012.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren studi tentang pandangan hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- <http://www.pamekasan.go.id/index.php/about-yjsg/default-grid-layouts>